

ABSTRAK

Perkembangan ekosistem esports di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan, namun dalam pelaksanaan kompetisi masih ditemukan tindakan kecurangan oleh penyelenggara yang merugikan tim maupun pemain. Kondisi ini diperparah dengan belum adanya landasan hukum nasional yang secara khusus mengatur penyelenggaraan kompetisi esports, sehingga pengawasan terhadap penyelenggara tidak berjalan optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tindakan penyelenggara kompetisi dan regulator dalam hal ini PBESI di Indonesia serta KeSPA di Korea Selatan dalam memberikan perlindungan hukum bagi tim esports yang dirugikan, serta bagaimana mekanisme pengawasan dan penegakan hak diterapkan di kedua negara. Penelitian ini bersifat deskriptif dan menggunakan metode yuridis komparatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan pelaku industri esports dan PBESI serta dilengkapi dengan peraturan perundang-undangan dan regulasi resmi sebagai bahan analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap tim esports di Indonesia masih belum optimal karena terbatasnya kewenangan PBESI, tidak adanya mekanisme banding, serta lemahnya transparansi keputusan penyelenggara. Sebaliknya, Korea Selatan telah menerapkan sistem regulasi yang komprehensif melalui Game Industry Promotion Act dan e-Sports Promotion Act yang memungkinkan adanya mekanisme double-checking antara KeSPA dan LCK, sehingga memberikan perlindungan hukum yang lebih efektif bagi tim dan pemain.

Kata kunci: Pengaturan Esports, Kompetisi Esports.